

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rafiz Kamili Alkadrie

NPP.30.0898

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Keuangan Publik

Email: rafizalqadrie26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, MM.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Pontianak City's original regional income is quite low, so to continue implementing regional autonomy, the Pontianak City government requires transfer funds from the central government. This study aims to determine the regional financial capacity of Pontianak City through financial ratio analysis over a period of 5 fiscal years. **Purpose:** This study aims to determine the analysis of financial capacity, inhibiting factors, and efforts to increase regional financial capacity in supporting regional autonomy in Pontianak City. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. The data used in this study were interviews with Pontianak City BKD officials as primary data and Pontianak City Budget Realization Reports as secondary data. The data were analyzed using data reduction methods, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The findings of this study indicate that the level of financial capability in Pontianak City is still relatively low, especially in the 2017-2021 period with a fiscal decentralization ratio of 27%, a financial independence ratio of 41%, and a dependency ratio of 67%, but the effectiveness ratio of Pontianak City's PAD management is classified as quite effective because the percentage is 96.2%. Based on the results of the analysis, there are driving and inhibiting factors in increasing the regional financial capacity of Pontianak City. **Conclusion:** Based on the findings obtained, there are efforts made by the regional government of Pontianak City to boost local sources of local revenue, especially in optimizing regional tax and retribution revenues in Pontianak City.

Keywords: *Analysis, Financial Capacity, PAD, Regional Autonomy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pendapatan Asli daerah Kota Pontianak terbilang cukup rendah, sehingga untuk tetap melaksanakan otonomi daerah, pemerintah Kota Pontianak memerlukan dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak melalui analisis rasio keuangan selama periode 5 tahun anggaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisa kemampuan keuangan, faktor penghambat, dan upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah di Kota Pontianak. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah hasil wawancara dari pejabat BKD Kota Pontianak sebagai data primer dan Laporan Realisasi APBD Kota Pontianak sebagai data sekunder. Data yang dianalisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan keuangan Kota Pontianak masih tergolong rendah terkhusus pada periode 2017- 2021 dengan rasio desentralisasi fiskal sebesar 27%, rasio kemandirian keuangan sebesar 41%, dan rasio ketergantungan diangka 67%, tetapi pada rasio efektivitas pengelolaan PAD Kota Pontianak tergolong cukup efektif karena dalam persentase 96,2%. Berdasarkan hasil analisis terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak. **Kesimpulan:** Berdasarkan temuan yang didapat, terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pontianak untuk mendongkrak sumber pendapatan asli daerah terutama dalam mengoptimalkan pendapatan pajak dan retribusi daerah di Kota Pontianak.

Kata Kunci: Analisis, Kemampuan Keuangan, PAD, Otonomi Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah secara umum memiliki tujuan yakni memberikan peluang kepada setiap daerah agar dapat meningkatkan kemandirian daerahnya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, dan masyarakat juga memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan daerah, mengoptimalkan perolehan wilayahnya sendiri dan meningkatkan akuntabilitas ekonomi daerah untuk memenuhi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Keuangan merupakan salah satu faktor terpenting yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Titik fokusnya adalah daerah yang memiliki kemampuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang seimbang dan dengan tingkat ketergantungan terhadap kebutuhan keuangan yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan antara kemampuan keuangan daerah dengan proses pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus mempersiapkan kemampuan keuangan daerah dengan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Diperlukan suatu indikator yang digunakan guna menganalisis serta mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kelancaran urusan pemerintahan pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan daerah begitu sangat bergantung dengan tersedianya anggaran. Dalam usaha untuk membiayai hal-hal tersebut pemerintah Kota Pontianak menggunakan pendapatan yang diperoleh didaerahnya berupa; Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya yang Sah. Pendapatan asli daerah memuat pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer bersumber dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan.

Tabel 1.1
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi PAD
2017	1.545.622.287.316	476.050.410.314	30,79
2018	1.663.204.429.560	440.358.120.031	26,47
2019	1.764.013.422.654	478.790.894.895	27,14
2020	1.547.232.307.256	403.422.945.219	26,07
2021	1.573.721.427.451	413.401.586.270	26,26

Sumber: APBD Kota Pontianak 2017-2021

Tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak tahun 2017-2021 secara perlahan menurun dari 5 periode (tahun anggaran) meskipun jika dilihat pada pendapatan daerah terjadi naik turun dari total pendapatan daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh masa pandemi covid-19 yang membuat perekonomian Pemerintah

Kota Pontianak turun. Berdasarkan tabel diatas dapat menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak masih terbilang rendah.

Otonomi daerah bertujuan untuk mendorong Pemerintahan Kota Pontianak untuk dapat mandiri dalam mengurus urusan pemerintahannya sendiri sehingga tidak lagi bergantung kepada Pemerintahan Pusat. Namun, kenyataan yang terjadi Pemerintah Kota Pontianak masih bergantung terhadap Pemerintah Pusat hal ini dapat dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Pontianak malah lebih rendah dari pada kontribusi Pendapatan Transfer, hal ini tentu akan berpengaruh pada tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak. Permasalah ini jika dibiarkan begitu saja dan tidak ditindaklanjuti maka proses pembangunan di Kota Pontianak akan terhambat tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat juga tidak terealisasikan dengan baik serta pemerintah daerah Kota Pontianak dianggap tidak maksimal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga perlu kerjasama serta usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan meningkatnya kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak. diperlukannya analisis kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak dalam mendukung terwujudnya otonomi daerah.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang merupakan 4eriod ek untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah masih kurang mendominasi daripada pendapatan transfer. Kontribusi pendapatan transfer masih terbilang tinggi, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap
Total Pendapatan Daerah Kota Pontianak
Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Kontribusi Transfer
2017	1.545.622.287.316	913.213.690.781	59,08
2018	1.663.204.429.560	1.158.053.989.529	69,62
2019	1.764.013.422.654	1.216.104.828.185	68,93
2020	1.547.232.307.256	1.062.590.864.860	68,67
2021	1.573.721.427.451	1.090.807.268.181	69,31

Sumber: APBD Kota Pontianak 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa pendapatan transfer masih mendominasi sebagai sumber pendapatan daerah. Kontribusi Pendapatan Transfer mencapai di angkat 50% keatas, dapat dikatakan bahwa Kota Pontianak dalam 5 (lima) tahun anggaran memiliki sumber pendapatan selain pendapatan transfer yang rendah. Kemampuan diukur dari kinerja pendapatan asli daerah, apabila pendapatan asli daerah dapat meningkat stabil dari 4eriod eke periode serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang dibutuhkan daerah maka dapat dikatakan bahwa telah memiliki kemampuan keuangan yang baik.

Melihat penjelasan diatas Kota Pontianak belum diketahui apakah mampu melaksanakan otonomi daerah dengan mengandalkan pendapatan asli daerah dan tanpa bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah memerlukan kolaborasi untuk mewujudkan kinerja keuangan yang baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian Atria Tiffany Widyaningsih (2015), “Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak”, Akademi Perpajakan Panca Bhakti. Dalam penelitian Atria Tiffany Widyaningsih mengemukakan bahwa Peningkatan pendapatan dan diimbangi dengan meningkatnya jumlah belanja menjadikan defisit daerah berfluktuasi. Pada tahun 2014 mengalami defisit. Kontribusi PAD mengalami peningkatan dari tahun 2011-2014.

Penelitian kedua oleh Anjar Nora Vurry, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiaatmaja (2018) “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Tren pada Pemerintah Kabupaten Buleleng”, dalam penelitian Anjar Nora Vurry, dkk mengemukakan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng masuk kategori rendah sekali. Dan rata-rata kemampuan keuangan daerah dikategorikan rendah dengan pola instruktif. Namun Trend yang dihasilkan cenderung naik. Penelitian ketiga oleh Jovan Febriantoko (2017) dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi di Pulau Sumatera” menyebutkan Berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian di Pulau Sumatera disimpulkan bahwa total PAD Provinsi Se-pulau Sumatera sebesar 18,025 Triliun. Derajat desentralisasi fiskal setinggi pada Provinsi Sumatera Utara dan terendah pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pada penelitian keempat oleh Sakinah Nurul Khaerati (2021) pada “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan” Tingkat kemampuan keuangan masih rendah, namun dalam efektifitas pengelolaan PAD sudah menunjukkan hasil yang baik. Dan penelitian Hery Susanty (2019) dalam “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram” juga menyebutkan bahwa Efektivitas PAD sudah sangat baik namun untuk rasio kemandirian, pertumbuhan, efisiensi dan aktivitas dinilai masih sangat kurang.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan data periode 2017-2021 dan menggunakan konsep teori rasio keuangan oleh Mahmudi (140:2019).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan serta mengetahui faktor penghambat dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Pontianak, dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Moloeng (2005:4) yang menyatakan bahwa Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa kata-kata (berupa angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan laporan, dokumen, dll) atau penelitian didalamnya dengan mengutamakan untuk pendikripsian secara analisis suatu peristiwa atau proses sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data triangulasi, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Mengutip dari Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:397) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Peneliti menetapkan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling karena orang-orang yang peneliti tetapkan sebagai informan adalah orang yang paham dan mampu memberikan informasi dan data yang akurat. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu merupakan pengertian Purposive sampling. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan hasil dari data yang dianalisis dan diolah oleh peneliti berdasarkan data primer dan sekunder yang didapat di lapangan. Pada bagian menyajikan hasil wawancara dengan informan yang bertugas dan berkompeten dalam memberikan informasi dalam mengelola keuangan daerah kota Pontianak. Selain itu, data sekunder yaitu APBD Kota Pontianak periode 2017-2021 dan dokumen terkait lainnya yang dapat memperkuat hasil analisis.

3.1 Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pontianak

Analisis yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan teori analisis rasio keuangan menilai kemampuan keuangan daerah di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019:142) berpendapat bahwa mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan analisis rasio dilihat dari beberapa hal, yakni sebagai berikut: (1) Rasio derajat desentralisasi, (2) Rasio Kemandirian keuangan daerah, (3) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan (4) Rasio efisiensi belanja.

Tabel 2. 1
Rasio Keuangan Kota Pontianak Periode 2017-2021

Rasio Keuangan	Tahun					Rata-Rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Rasio Derajat Desentralisasi	30,79%	26,47%	27,14%	26,07%	26,26%	27,35%
Rasio Kemandirian Keuangan	52,12%	38,02%	39,37%	37,96%	37,89%	41,07%

Rasio Ketergantungan Keuangan	59,08%	69,62%	68,93%	68,67%	69,31%	67,12%
Rasio Efektivitas PAD	115,50%	93,80%	100,40%	75,20%	76,80%	92,34%

Sumber: diolah oleh penulis

a. Rasio Desentralisasi Fiskal

Besar persentase derajat desentralisasi Kota Pontianak selama 5 tahun anggaran berada pada angka 27%. Jika diukur dengan skala interval yang dapat dilihat pada tabel 2.1 maka berada pada skala 0,01 - 30,00, yang artinya rasio derajat desentralisasi Kota Pontianak berada pada skala interval yang cukup.

b. Rasio Kemandirian Keuangan

Persentase tingkat kemandirian keuangan daerah Kota Pontianak dengan kemandirian rata-rata 41%, Kota Pontianak berada pada skala 25-50 yang artinya bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Pontianak berada pada skala interval rendah sehingga menunjukkan adanya pola hubungan konsultatif pemerintah akan lebih banyak memberikan konsultasi tentang penyelenggaraan otonomi daerah karena dirasa sudah sedikit mampu melaksanakan otonomi tersebut.

c. Rasio Ketergantungan Keuangan

Tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Pontianak yang tinggi dengan persentase di atas 67%. Jika mengacu pada skala interval maka Kota Pontianak berada pada skala >50,00. Dengan artinya rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Pontianak berada pada skala interval yang sangat tinggi.

d. Rasio Efektivitas PAD

Persentase rasio efektivitas pengelolaan PAD Kota Pontianak menunjukkan berada pada angka 92%. Rasio efektivitas Kota Pontianak dikategorikan cukup efektif dalam pengelolaan PAD. Kelemahan manajemen penerimaan sumber pendapatan asli daerah serta masih belum efektifnya penerimaan PAD yang terdapat pada pemerintah Kota Pontianak.

3.2 Faktor Penghambat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Pontianak

Kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai dari pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah karena dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan luar lingkungan Pemerintah daerah Kota Pontianak. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kemampuan daerah kota pontianak adalah sebagai berikut:

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah Belum Optimal

Tingkat kemampuan keuangan daerah pada dasarnya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah yang tinggi dan dominan akan berdampak pada tingkat kemampuan keuangan daerah yang juga akan terus meningkat dan begitu juga sebaliknya. Apabila pendapatan asli daerah jika tergolong rendah maka kemampuan keuangan daerah yang dimiliki suatu daerah juga tidak akan bisa maksimal dan akan masuk dalam kategori rendah. Potensi sumber daya alam merujuk pada sumber daya alam yang tersedia di

suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, jika potensi sumber daya alam tersebut tidak dioptimalkan dengan baik, maka hal tersebut dapat berdampak negatif pada pendapatan daerah. Pemerintah daerah bisa memperkuat infrastruktur dan sistem administrasi pajak dengan cara membangun dan meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan seperti sistem informasi dan basis data yang terintegrasi dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Di samping itu, pemerintah daerah dapat memperkuat sistem administrasi pajak dengan menyediakan sumber daya manusia dan teknologi yang cukup untuk meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan pajak.

b. **Ketergantungan Dana Transfer**

Kota Pontianak tahun anggaran 2017-2021 besarnya kontribusi dana yang berasal dari pihak eksternal, dimana pemerintah pusat berperan besar dalam memfasilitasi kegiatan dan program pemerintah daerah Kota Pontianak. Ketergantungan tersebut berupa ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, dapat menyebabkan pembatasan dalam pengambilan keputusan di daerah, terutama dalam hal merencanakan dan mengelola keuangan daerah. Pembatasan ini disebabkan oleh persyaratan dan peraturan-peraturan yang mengikat dalam penggunaan dana transfer, serta ketidakpastian dimana dana transfer tersebut akan terus tersedia di masa depan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang mandiri dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. **Sumber Daya Aparatur Terbatas**

Sumber Daya Aparatur yang terbatas dalam kinerja kemampuan keuangan daerah merujuk pada keterbatasan sumber daya manusia dan keterampilan para pegawai atau aparatur di dalam pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan keuangan daerah. Keterbatasan ini dapat menghambat kinerja instansi tersebut dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, seperti pengawasan dan penagihan pajak, serta perencanaan pengeluaran untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan memadai untuk memastikan kinerja optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.3 Upaya Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

a. **Mengoptimalkan Sumber PAD**

Cara mengoptimalkan perolehan pada pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah dengan jemput pajak, uji petik, dan pemeriksaan. Selain itu mendongkrak pendapatan asli daerah dapat dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Intensifikasi merupakan suatu usaha dalam meningkatkan hasil produksi dengan cara memaksimalkan kemampuan ataupun produktivitas. Maksudnya, menargetkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Sedangkan, ekstensifikasi adalah meningkatkan hasil produksi atau memperluas hial produksi. Maksudnya adalah menargetkan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi diharapkan dapat mendongkrak pendapatan asli daerah Kota Pontianak.

b. **Meningkatkan Sumber Daya Aparatur**

Badan Keuangan Daerah terus menambah serta menggali kompetensi seluruh pegawainya sebagai bentuk salah satu upaya dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak. Dalam hal ini, untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan pegawai disetiap bidang masing-masing, diharapkan pegawai tersebut mampu berkompetisi dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya saat kembali bekerja di Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah Kota Pontianak.

c. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

Memberikan perhatian dan layanan yang memadai melalui pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Ketika pelayanan publik dilakukan secara efektif, masyarakat merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan mereka dihargai sebagai warga negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan meningkatkan kepercayaan mereka dalam pengelolaan keuangan daerah. Kota Pontianak terus memaksimalkan agar pelayanan publik menjadi lebih maksimal. Pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Ketika pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik dan memadai, masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), karena semakin patuh warga dalam membayar pajak, semakin besar juga jumlah pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja keuangan daerah kota Pontianak tahun 2017-2021 dianalisis melalui rasio keuangan melalui 3 indikator yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak yaitu Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan analisis tahun 2017-2021, pendapatan daerah kota Pontianak mengalami kondisi naik turun. Hal ini mungkin disebabkan oleh masa pandemi covid-19 yang membuat perekonomian Pemerintah Kota Pontianak turun. Pendapatan asli daerah ikut mempengaruhi jumlah pendapatan daerah kota Pontianak, pendapatan asli daerah juga ikut mengalami naik turun. Pada tahun 2017-2019 pendapatan daerah mencapai target yang diinginkan, sedangkan pada tahun 2020-2021 pada realisasinya pendapatan daerah belum mencapai target.

Selain mengandalkan pendapatan asli daerah, Kota Pontianak juga mengandalkan pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pendapatan transfer sangat berperan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Pontianak. Pada tahun 2017-2021 kontribusi pendapatan transfer pada pendapatan daerah kota Pontianak rata-rata sebesar 67%. Pada tahun 2017 pendapatan transfer sebesar 913 Milyar, tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan menjadi 1.158 Milyar dan 1.216 Milyar. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1.062 milyar, dan naik kembali tahun 2021 menjadi 1.090 Milyar.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa analisis kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak dengan hasil rasio indikator kinerja keuangan adalah sebagai berikut: Hasil analisis Rasio

Derajat Desentralisasi Fiskal kota Pontianak menunjukkan angka rata-rata 27,35% termasuk kategori skala interval cukup membiayai kegiatan otonomi daerah. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan rata-rata 41,07% dengan kategori konsultatif. Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan menunjukkan rata-rata 69,31% dengan skala interval sangat tinggi pada pendapatan transfer. Dan hasil Rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata 92,34% dengan skala interval cukup efektif dalam mengelola PAD.

Terdapat 3 faktor penghambat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yaitu sumber pendapatan daerah belum optimal, sumber daya aparatur yang terbatas, dan bergantung dengan dana transfer. Dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, pemerintah Kota Pontianak melakukan upaya untuk mengatasi faktor tersebut dengan mengoptimalkan PAD, mengoptimalkan sumber daya aparatur, dan meningkatkan pelayanan public.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan terutama kepada kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Mahmudi. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

SUMBER LAINNYA

- Febriantoko, Jovan. 2017. "Analisis Kinerja dan Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Pontianak". *Jurnal Teknologi dan In-formatika* Vol 2 No 1 dari <http://ojs.palcomtech.ac.id/index.php/SNTIBD/article/view/348>
- Khaerati B, Sakinah Nurul (2022) "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan"
<http://eprints.ipdn.ac.id/7012>
- Nora, Anjar. dkk 2018. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend Pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng". *Bisma Jurnal Manajemen*
- Widyaningsih, Atria Tiffany. 2015 "Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera". *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol 4 No 3.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/15326/0>

